

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh

MUHADLIR S. BAKUE

NIM : 271 412 052

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Lisnawaty W. Badu, SH., MH
NIP. 19690529 200501 2 001

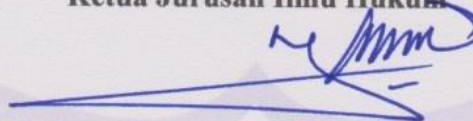
Pembimbing II



Suwitno Y. Imran, SH, MH
NIP. 19830622 200912 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH.. MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh:

MUHADLIR S. BAKUE

NIM : 271 412 052

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal: Agustus 2019

Pukul : 10.00 WITA S/D SELESAI

Komisi penguji :

1. Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH (.....)
NIP. 197412232003122011
2. NOVENDRI M. NGGILU, SH.,MH (.....)
NIP. 198911272014041001
3. LISNAWATY W. BADU, SH., MH (.....)
NIP. 196905292005012001
4. SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH (.....)
NIP. 198306222009121004

Gorontalo, Agustus 2019

Mengetahui;

Plt. Dekan Fakultas Hukum



Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH

NIP. 197412232003122011

ABSTRAK

Muhadlir S. Bakue, Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Agustus 2019, Skripsi, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.35/PUU-X/2012 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lisnawaty W. Badu, SH., MH, Pembimbing I dan Suwitno Y Imran, SH., MH , Pembimbing II.

Pengakuan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara tertuang dalam Undang-Undang Dasar negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam UU kehutanan memberikan batasan kepada masyarakat hukum adat, dimana negara memiliki kepemilikan terhadap hutan dan hutan adat

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan serta Implikasi dari lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pengaturan tentang masyarakat hukum adat telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga UU turunannya. Akan tetapi, dalam UU Kehutanan masih belum terdapat ruang untuk pemberian hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh, dimana hutan (baik hutan negara maupun hutan adat) masih belum dimiliki oleh masyarakat adat sepenuhnya. Hal ini yang kemudian diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 berimplikasi pada adanya kewajiban pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum baru sekaligus masyarakat hukum adat mendapatkan kembali hak kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Mahkamah Konstitusi, Implikasi Putusan.

**Analysis of Constitutional Court's Verdict Number.35/PUU-X/2012 on the
Testing of Law Number 41 of 1999 about Forestry in the Perspective of
Customary Law Community Protection.**

MUHADLIR S. BAKUE

The principal supervisor is Lisnawati W. Badu, SH., MH

The co-supervisor is Suwitno Y. Imran, SH., MH

ABSTRACT

Recognition toward the position of customary law community is one of the important elements in state life contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in forestry law limits the customary law community, the country has ownership toward forest and customary forest.

Based on the reason above, the researcher is interested in studying the arrangement of the rights of customary law community in law and regulation as well as the implication of the inception of Constitutional Court's verdict No. 35/PUU-X/2012 toward the protection of customary law community in Indonesia. This is juridical and normative research applying primary and secondary law material as the law material of the research.

The findings show that the arrangement of customary law community has been spread in some law and regulation, starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to derivative laws. However, in forestry law, there is no place for granting the rights of customary law community entirely, in which the forest (either state forest or customary forest) does not belong to customary community entirely. This is then tested and decided by Constitutional Court. Moreover, the inception of constitutional court's verdict number 35/PUU-X/2012 implies the obligation of government to issue new law and the customary law community regains freedom right to manage and utilize the entire natural products within the area of customary forest.

Keywords: Customary Law Community, Constitutional Court, Verdict Implication

